KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengalihan Pengelolaan Wakaf Masjid Basyaruddin kepada Pemerintah Desa di Desa Bogem Gurah Kediri*" ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana kasus pengalihan pengelolaan wakaf di Masjid Basyaruddin ke Pemerintah Desa. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan pengelolaan wakaf Masjid Basyaruddin kepada Pemerintah Desa?

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir induktif, dimana dari kasus pengalihan pengelolaan wakaf masjid Basyaruddin kepada pemerintah Desa, kemudian dianalisis dengan menggunakan teori umum tentang wakaf menurut hukum Islam dan hukum positif, *nāẓir* menurut hukum Islam dan hukum positif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengalihan pengelolaan atau wakaf masjid Basyaruddin yang mengakibatkan pergantian *nāẓir* dilatar belakangi oleh perselisihan antar ahli waris dan tidak berfungsinya *nāẓir* secara maksmial. Hal ini menyebabkan adanya penguasaan *nāẓir* yang berasal dari keluarga, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial bagi keluarga lainnya. Perselisihan ini jika tidak segera diselesaikan maka dikhawatirkan akan menyulut perselisihan yang lebih besar lagi. Oleh sebab itu untuk menghindari hal tersebut maka pengelolaan wakaf masjid Basyaruddin dialihkan kepada pemerintah Desa Bogem.

Dalam proses pengalihan pengelolaan wakaf masjid Basyaruddin kepada pemerintah Desa ini tidak sesuai dengan Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 45 tentang mekanisme pergantian *nāẓir* dan juga Pasal 67 tentang Penyelesaian sengketa. Namun jika kita tinjau dari upaya Pemerintah Desa untuk menghindari perselisihan yang lebih luas maka tindakan pemerintah Desa dapat dibenarkan. Hal ini berdasarkan kaidah *"menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat"*, dan apa yang dilakukan oleh pemerintah Desa adalah upaya untuk menghindari perselisihan yang lebih luas. Selain itu pemerintah adalah bagian dari *ūlil Amri* yang harus ditaati.

Berdasarkan analisis diatas, disarankan kepada pemerintah Desa dan juga KUA untuk segera membentuk *nāẓir* yang baru sesuai dengan mekanisme yang berlaku baik menurut hukum Islam maupun hukum Postif. Selain itu jika dalam musyawarah tidak ditemukan jalan tengah maka dapt diselesaikan di Pengadilan Agama setempat. Serta memberikan pelatihan kepada para *nāẓir* sehingga pengelolaan wakaf secara umum dapat berjalan dengan baik dan meminimalisir segala bentuk penyelewengan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan wakaf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id